

**PELAKSANAAN TATA KELOLA KEUANGAN DPRD  
DALAM PERSPEKTIF KEPEREMINTAHAN YANG BAIK  
(Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat)**

**Nidya Putri Syahida, Sjamsiar Sjamsuddin, Ratih Nur Pratiwi,**  
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang  
E-mail: snidyaputri@yahoo.com

**ABSTRACT:** *Implementation of the Financial Management Parlements of the Good Governance perspective. Due to weak financial governance of parlements implementation which do not meet the elements of good Governance, the values of accountability, transparent, efficient, and effective, as well as abiding by the rules of law. the research aims to describe and analyze the 1) the implementation of parlements financial in the perspective of good Governance 2) describes and analyzes the factors that become supporters and restricting financial implementation of parlements in the perspective of good Governance. The financial governance covers several stages of the planning phase, stage, stage, stage of administering accountability and monitoring stages. This research uses qualitative descriptive method developed by Straus and Corbin through three phases namely open cording, axial coding, and selective coding. The results of this research is to 1) the planning stages have not been based on the value of good Governance 2) stage of implementation ignores the value of effective and efficient 3) stage of administering have implemented value accountability, but have yet to apply transparency accountability has not been Phases 4) applying accountability 5) stage of scrutiny has been based on the rules that apply. Factors supporting the financial governance include: 1) the harmonious Relationship among the actors head of authority with the segwey in determining financial parlements. While the factors restricting financial governance are: 1) Has a less competent human resources in the financial governance of parlements. 2) lacking the facilities to support the Finance of parlements.*

**Keywords:** *financial management, and good governance.*

**ABSTRAK:** *Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan DPRD dalam Perspektif Kepemerintahan yang Baik. Karena lemahnya pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD yang belum memenuhi unsur dari pemerintahan yang baik, yaitu nilai akuntabilitas, transparan, efisien, dan efektif, serta taat pada aturan. Penelitian bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif pemerintahan yang baik 2) mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif pemerintahan yang baik. Tata kelola keuangan tersebut meliputi beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pertanggungjawaban dan tahap pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dikembangkan oleh Straus dan Corbin melalui tiga tahapan yaitu open cording, axial coding, dan selective coding. Hasil penelitian ini adalah 1) Tahap perencanaan belum berpedoman pada nilai pemerintahan yang baik 2) Tahap pelaksanaan mengabaikan nilai efisien dan efektif 3) Tahap penatausahaan telah menerapkan nilai akuntabilitas, namun belum menerapkan nilai transparansi 4) Tahap pertanggungjawaban belum menerapkan nilai akuntabilitas 5) Tahap pengawasan telah berpedoman pada aturan yang berlaku. Faktor pendukung tata kelola keuangan tersebut di antaranya: 1) Hubungan harmonis diantara aktor yaitu kepala SKPD dengan pihak berwenang dalam penentu keuangan DPRD. 2) Budaya organisasi dengan membangun budaya kekeluargaan tanpa mengesampingkan profesionalisme telah diterapkan. Sedangkan faktor penghambat tata kelola keuangan adalah: 1) Memiliki SDM yang kurang berkompeten dalam tata kelola keuangan DPRD. 2) Kurang memiliki fasilitas yang mendukung dalam tata kelola keuangan DPRD.*

**Kata kunci:** *tata kelola keuangan, dan pemerintahan yang baik.*

## Pendahuluan

Sebuah pemikiran untuk mereformasi dan memiliki inovasi baru dalam pemerintahan merupakan awal dari lahirnya konsep pemerintahan. Salah satu alat dalam konsep ini adalah pemerintahan yang baik "*good governance*". Melalui alat ini terbentuk sebuah pemikiran untuk merubah paradigma pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi sehingga pengawasan dan spesifikasi pekerjaan dapat lebih mudah dilakukan. Untuk mempermudah menjalankan konsep desentralisasi ini maka daerah diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri melalui otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Konsep pemerintahan yang baik atau *good governance* ini tidak mudah untuk diterapkan, beberapa masalahpun muncul. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah masalah anggaran. Anggaran yang dimaksud disini adalah anggaran publik. "Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter" (Mardiasmo, 2002a,h.62).

Anggaran tersebut memiliki banyak fungsi dan salah satunya adalah sebagai alat kontrol terhadap kinerja untuk menentukan keberhasilan kinerja antara perencanaan awal dengan *output* yang dihasilkan.

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga suatu pemerintahan dikatakan baik, jika taat pada aturan hukum yang berlaku. Faktor tersebut menjadi alasan bagi penulis untuk menggunakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai landasan dalam analisis data pada penelitian ini.

Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang selalu berupaya untuk menciptakan konsep *good governance*. Namun dalam perjalanannya tidak mudah untuk melaksanakan konsep tersebut. Termasuk di dalam tubuh sekretariat DPRD

yang berperan sebagai fasilitator DPRD, salah satunya adalah DPRD Lombok Barat. Berdasarkan peraturan Bupati Lombok Barat nomor 52 Tahun 2011, pada tahun anggaran 2012 DPRD Kabupaten Lombok Barat memperoleh anggaran belanja sebesar Rp 20.489.041.489,63 (Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Buku 1, h.599)

Sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka sudah selayaknya dana sejumlah dua puluhan (20-an) milyar lebih tersebut dapat dipergunakan secara efektif dan efisien serta penggunaannya dapat dilakukan secara transparansi dan mampu untuk dipertanggungjawabkan. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan beberapa hal yang mendukung seperti kualitas SDM yang dimiliki, fasilitas serta budaya yang tercipta dalam lingkungan organisasi tersebut. Sedangkan pada realitanya, masih banyak para aparatur yang berpendidikan rendah dan kurang berpengalaman dalam organisasi.

Terlebih lagi sebagai fasilitator DPRD sudah seharusnya sekretariat DPRD menyediakan suatu akses yang mudah untuk masyarakat mengetahui tentang kondisi DPRD terkini sesuai dengan parameter yang harus diperhatikan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi terhadap publik. Namun pada realitanya ketika situs DPRD dibuka tidak sedikitpun informasi bisa didapat dari situs resmi tersebut, seolah-olah situs itu dibuat hanya sebagai simbol saja tetapi tidak di fungsikan dengan baik. Berdasarkan fakta empirik, regulasi yang mendasari permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melihat dan menganalisis kondisi sekretariat DPRD dalam menata dan mengelola anggaran agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

## Tinjauan Pustaka

### 1. Pemerintahan

Pada masa globalisasi ini maka sangat diperlukan suatu reformasi administrasi publik, karena sejatinya administrasi publik merupakan suatu proses yang bersifat

dinamis dan selalu membutuhkan inovasi baru untuk dapat maksimal. Salah satu inovasi baru dalam Administrasi publik adalah “konsep *governance*”. Dalam bukunya reformasi birokrasi dalam rangka *good governance*, (Rewansyah, 2010, h.80) mengatakan bahwa “*governance* diartikan dengan pemerintahan yang bahasa inggrisnya *the act, fact, manner of Governing*. Dengan demikian, *governance* atau pemerintahan merujuk pada kegiatan atau proses, suatu cara atau metode, tindakan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Teori *governance* menjelaskan secara makro proses-proses perubahan dalam pemerintahan. *Governance* berarti pengambilan keputusan atau kebijakan publik dan proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan.”

Istilah *governance* merujuk pada peran, struktur, dan proses operasional pemerintah atau cara menyelesaikan masalah sosial. Mardiasmo mengungkapkan karakteristik *Good Governance* menurut UNDP adalah: *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, strategic vision* (Mardiasmo, 2002b, h.24).

Sementara Sjamsuddin (2005, h.7) mengatakan bahwa bukan sekedar cara atau metode, kegiatan atau proses dan sistem tetapi juga berarti cara kekuasaan, penggunaan kewenangan ekonomi, politik dan administratif, sebagai instrumen kebijakan publik, dan proses interaksi sosial politik. Adapun prinsip-prinsip dari *governance* (Sjamsuddin, 2005, h.63-66):

- a. Prinsip demokrasi dan pemberdayaan
- b. Prinsip pelayanan
- c. Prinsip transparansi dan akuntabilitas
- d. Prinsip partisipasi
- e. Prinsip kemitraan
- f. Prinsip desentralisasi
- g. Konsistensi kebijakan dan kepastian hukum

## 2. Konsep Desentralisasi

Desentralisasi merupakan suatu cara pemerintah untuk memberikan kewenangan terhadap pemerintah dari yang tingkatannya lebih tinggi ke rendah (pusat-daerah) dalam suatu sistem pemerintahan tersebut agar

mampu menciptakan pemerintahan yang baik karena dianggap lebih dekat dengan rakyat, sehingga mampu mencapai “*good governance*”.

Jenis-jenis desentralisasi menurut Rondinelli adalah: dekonsentrasi, delegasi, devolusi, privatisasi. (Muluk, 2009, h.12). Sedangkan UNDP (2009) mengungkapkan jenis desentralisasi, menjadi devolusi, dekon-sentralisasi, dan delegasi.

## 3. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah

Dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 5 telah disebutkan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah”, sedangkan dalam ayat 6 juga disampaikan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Dan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 10 dijabarkan tugas dan wewenang pemerintah daerah.

Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 tentang Pemerintahan Daerah definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom pada pasal 1 ayat 6 sebagai berikut:

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah setempat menuut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dari pengertian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut kemudian Ryaas Rasyid, dalam workshop AAPI tahun 2002 menerangkan bahwa visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup interaksinya yang utama, yaitu: politik,

ekonomi, serta sosial dan budaya. (Syamsudin, 2002, h.8).

Dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjelaskan bahwa:

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dan mengenai dana dalam penyelenggaraan tersebut yang disebut APBD telah di atur dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, seperti yang tercantum dalam pasal 1 poin 17 yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### 4. DPRD

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan dalam pasal 40 bahwa “DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Sementara di dalam pasal 41 telah disebutkan bahwa DPRD memiliki 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menjelaskan tentang tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban DPRD. Untuk menjalankan tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban DPRD tersebut mengacu pada PP Nomor 37 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

#### 5. Dasar-Dasar Anggaran Publik

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2002a, h.62). Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam rangka penyusunan suatu anggaran adalah prinsip keterbukaan, periodik, pembebanan anggaran pengeluaran dan menguntungkan anggaran penerimaan, fleksibilitas, prealabel, kecermatan, kelengkapan, komprehensif, terinci, anggaran berimbang, pendapatan yang ajeg, kontinyu dan anggaran yang setiap tahun ada kenaikan (Soejipto dan Seno dikutip dari Yuswar dan Subri, 2005, h.37). Kemudian berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah membagi pengelolaan keuangan daerah menjadi 5 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Dalam penganggaran teori agensi merupakan suatu teori yang menghubungkan masalah pemilik dan pengelola anggaran yang disebut dengan hubungan *principal agen*. Hubungan *principal agen* terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain. Pengaruh atau ketergantungan ini diwujudkan dalam kesepakatan-kesepakatan dalam struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak.

Moe juga mengatakan *politician* merupakan *principals*, dan birokrat merupakan agen masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan *politician* adalah legislatif dan birokrat merupakan eksekutif, dimana setiap aktor memiliki tanggung jawab dan dan saling berhubungan. Yang dikatakan Moe dalam jurnalnya, (1984, h.755). Dalam penyusunan anggaran daerah berdasarkan teori agensi terdapat enam aktor yang terlibat yaitu masyarakat, Kepala Daerah, DPRD, TAPD, Kepala SKPD, dan staff SKPD.

Hasil dari kongres internasional ilmu administrasi ke-28 di Bali mengungkapkan bahwa sektor keuangan merupakan hal

penting yang harus diperhatikan, untuk dapat meningkatkan perekonomian dan mampu menghasilkan suatu produk yang efektif dan efisien seperti yang telah diungkapkan oleh Eugenijus Chivickas, 2010 dalam Sjamsuddin (2010, h.253). Dwiputrianti juga mengungkapkan pentingnya pihak auditor untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu sektor publik dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan transparansi (Sjamsuddin, 2010, h.261).

## 6. Kinerja

Kinerja merupakan hubungan yang erat antara input-proses-output didalam suatu organisasi yang menentukan keberhasilan organisasi tersebut. Ada 3 hal penting yang harus diketahui oleh seorang manajer dalam menentukan desain yang dikemukakan oleh Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2007, h.346-348), yaitu dasar ukuran kinerja, kriteria ukuran kinerja, karakteristik kinerja. Dalam pelaksanaan kinerja perlu memahami beberapa aspek yaitu lingkungan kinerja, memahami kinerja, perilaku mendorong kinerja, model kinerja, indikator kinerja, kinerja organisasional, kinerja individu dalam kelompok (wibowo, 2007, h.77).

## Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif pemerintahan yang baik di Kabupaten Lombok Barat. Dalam bagian ini, peneliti mengambil beberapa yang menjadi hal utama untuk diangkat menjadi fokus peneliti, tentang prosedur tata kelola keuangan DPRD, yaitu :
  - a. Tahap perencanaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik
  - b. Tahap pelaksanaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik
  - c. Tahap penatausahaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik

- d. Tahap pertanggungjawaban anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik
- e. Tahap pengawasan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik

2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif pemerintahan yang baik di Kabupaten Lombok Barat.

Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Lombok Barat dengan situs penelitian di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat dan BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, metode pencatatan serta dokumentasi

Metode yang digunakan adalah metode yang dikembangkan oleh Strauss dan Corbin yang menggunakan tiga langkah besar dalam melakukan analisis data kualitatif yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*.

## Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Tatakelola Keuangan DPRD dalam Perspektif Pemerintahan Yang Baik di Kabupaten Lombok Barat

#### a. Tahap Perencanaan Anggaran dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik

Penguatan tugas dan fungsi DPRD merupakan salah satu agenda pemerintah untuk dapat mewujudkan desentralisasi. Semenjak adanya otonomi daerah, maka tanggungjawab yang dibebankan kepada daerah atas keberlangsungan kehidupan di setiap daerah menjadi lebih besar, sehingga diharapkan DPRD dapat lebih berperan yang sebelum adanya otonomi peran DPRD sangat terbatas. Sekretariat DPRD merupakan SKPD yang berperan dan membantu DPRD dalam menjalankan tanggungjawab dan fungsinya tersebut. Oleh sebab itu, sekretariat DPRD dalam menentukan perencanaan programpun harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan DPRD.

Pada tahap ini sekretariat DPRD belum menggunakan aturan yang berlaku dan sesuai terhadap perubahan-perubahan. Peraturan menteri dalam negeri yang terbaru adalah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Permendagri tersebut telah dua kali mengalami perubahan, namun dari data yang diberikan acuan yang digunakan oleh sekretariat DPRD dalam menjabarkan program-program masih menggunakan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Dilihat dari hal tersebut terjadi ketidak sinkronan antara peraturan yang berlaku dengan praktek yang terjadi. Padahal untuk mencapai pemerintahan yang baik, salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah *rule of law*.

Tahap Perencanaan ini melibatkan DPRD dalam penentuannya, sementara DPRD sendiri juga sebagai pengguna anggaran tersebut, sehingga proses ini terjadi komunikasi politik di dalamnya. Teori Agensi mengungkapkan bahwa posisi DPRD yang disebut sebagai legislatif atau *politician* dapat berperan sebagai *principals* dan dapat pula berperan sebagai agen. DPRD berperan sebagai *principals* saat menggantikan peran rakyat, dan berperan sebagai agen ketika menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat.

#### **b. Tahap Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik**

Pelaksanaan anggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala SKPD yang disini adalah sekretaris DPRD untuk dapat mempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah.

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan keuangan daerah Pasal 122 Ayat 5 disebutkan bahwa “jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja, Atas.

Pemerintah Kabupaten Lombok barat melakukan perubahan APBD setelah terjadi pertanggungjawaban semester pertama, agar dapat berjalan lebih baik lagi.

#### **c. Tahap Penatausahaan Anggaran dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik**

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 185 menyebutkan beberapa pejabat yang harus diperhatikan dalam proses anggaran yaitu : PPK, PPTK, bendahara penerimaan, pengeluaran, pembantu bendahara. Sesuai dengan data yang didapat, terdapat beberapa pejabat yang berperan didalamnya menunjukkan sinkronisasi antara aturan yang ada dengan kondisi dilapangan. Kabag. keuangan disini berperan sebagai PPK, kemudian kabag lainnya berperan sebagai PPTK karena bertanggungjawab terhadap program-program sesuai dengan bagiannya, dan bendahara penerimaan dan pengeluaran ini jadi satu dengan alasan SKPD ini jarang menerima penerimaan. Posisi masing-masing tersebut saling berhubungan dengan yang satu dan lainnya dan seluruh kegiatan, pengeluaran anggaran harus atas pengetahuan kepala SKPD.

#### **d. Tahap Pertanggungjawaban Anggaran dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik**

Pertanggungjawaban merupakan tahap paling penting dari penggunaan anggaran karena pada tahap ini dapat diketahui tingkat keberhasilan, dan tercapai tidaknya seluruh program yang telah direncanakan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah berupa catatan-catatan pelaksanaan anggaran. Pertanggungjawaban ini di atur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 189 yang menyebutkan pertanggungjawaban bendahara penerima secara administrasi dan fungsional berupa buku kas umum, pembantu perincian objek penerimaan, rekapitulasi penerimaan harian, buku penerimaan lainnya yang sah, pengisian dokumen berupa komputer/elektronik. Aturan tersebut telah sesuai seperti apa yang telah dilakukan oleh sekretariat DPRD ini, karena seluruh dokumen tercantum dalam komputer khusus keuangan yang menjadi

tanggungjawab operator komputer bagian keuangan.

Dengan informasi yang terpusat memudahkan pihak-pihak yang ingin mengetahui terkait anggaran tersebut. Meskipun dokumen anggaran ini tertata dengan baik, dokumen ini hanya dapat dilihat oleh internal saja, dan beberapa pihak yang memiliki kuasa untuk melihat seperti BPK, dan Bupati, namun pihak lain tidak dapat melihatnya.

Proses pertanggungjawaban dilakukan dalam dua tahap yaitu pada semester pertama, dan pada akhir tahun anggaran.

#### **e. Tahap Pengawasan Anggaran dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik**

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan di sini dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan. Kemudian selain itu pengawasanpun dibagi menjadi dua yaitu pengawasan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh kepala SKPD sendiri, dan eksternal dilakukan oleh BPKP dan Irjen. Ini adalah solusi yang ditawarkan oleh Dwiputriyanti dalam Kongres Internasional Ilmu Administrasi ke-28 tahun 2010 di Bali yang menyarankan adanya pihak auditor untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu sektor publik dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dan transparansi dari pihak eksternal. Maka dengan adanya tim audit dari pihak BPK sangat diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja sektor publik dan terhindar dari penyimpangan yang ada.

#### **2. Faktor-Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Tatakelola Keuangan DPRD dalam Perspektif Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Lombok Barat**

##### **a. Faktor pendukung:**

*Pertama* dengan tujuan dan target yang ingin dicapai ini jelas,

bersinergi dan kontinyu sesuai dengan prinsip penganggaran akan memudahkan untuk melakukan perencanaan anggaran yang matang sehingga anggaran tidak mengalami defisit. *Kedua* hubungan harmonis antar aktor dan yang *ketiga* budaya organisasi Hubungan harmonis di antara aktor telah terjalin.

##### **b. Faktor Penghambat:**

*Pertama*, kurang memiliki fasilitas yang mendukung sehingga memakan waktu dan biaya yang lebih besar. *Kedua*, memiliki SDM yang berkualitas dengan jumlah yang minim. Bahkan masih terdapat SDM yang berkualitas rendah sehingga mengganggu jalannya proses pemerintahan yang baik.

#### **Kesimpulan**

1. Pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif pemerintahan yang baik di Sekretariat DPRD kabupaten Lombok Barat belum dapat berjalan dengan lancar karena beberapa prinsip belum berjalan dengan baik pada setiap tahap tata kelola keuangan tersebut. Seperti:

- a. Tahap perencanaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik belum menerapkan kriteria taat pada aturan dilihat dari acuan yang dipergunakan dalam merencanakan anggaran tahun 2012 seharusnya menggunakan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua dari permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- b. Tahap pelaksanaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik sudah berjalan cukup baik dilihat dari persentase keberhasilan program pada SKPD sekretariat DPRD ini yang mencapai 97,65%, angka yang tinggi dan hamper mendekati sempurna. Dari persentase tersebut dapat dilihat bahwa kriteria efisien dan efektif sudah berjalan dengan baik.
- c. Tahap penatausahaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan

- tahan yang baik sudah berjalan dengan baik karena dalam tahap ini terjadi spesifikasi pembagian kerja yang jelas. Dan menuju ke arah kriteria akuntabilitas terlihat dari pelaporan yang jelas dan terpusat, namun laporan tersebut belum dapat diakses langsung oleh publik sehingga prinsip transparansi belum berjalan dengan baik.
- d. Tahap pertanggungjawaban anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik belum berjalan dengan baik. Tahap ini merupakan tahap yang menuntut kriteria akuntabilitas yang tinggi, namun dalam tahap ini kriteria tersebut belum berjalan. Dimana seharusnya SKPD dapat mempertanggungjawabkan kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan tidak dapat diakses oleh publik sehingga transparansipun secara langsung juga belum diterapkan.
  - e. Tahap pengawasan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik telah berjalan dengan baik. Tahap ini menjalankan sesuai dengan aturan yang ada, seperti yang tercantum dalam permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu pemberian pedoman pelaksanaan, memberikan arahan, bimbingan, supervise, konsultasi telah dilaksanakan.
  2. Dalam menjalankan tata kelola keuangan SKPD Sekretariat DPRD memiliki faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung tersebut diantaranya adalah:
    - a. Memiliki tujuan dan target yang jelas sehingga memudahkan untuk menetapkan besaran anggaran agar tidak mengalami defisit
    - b. Hubungan harmonis diantara aktor telah terjalin.
    - c. Budaya organisasi dengan membangun budaya kekeluargaan tanpa mengesampingkan profesionalisme telah diterapkan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif pemerintahan yang baik di sekretariat DPRD kabupaten Lombok Barat di antaranya adalah:

    - a. Kurang memiliki fasilitas yang mendukung sehingga memakan waktu dan biaya yang lebih besar.
    - b. Memiliki SDM yang berkualitas dengan jumlah yang minim. Bahkan masih terdapat SDM yang berkualitas rendah sehingga mengganggu jalannya proses pemerintahan yang baik.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Chlivickas, Eugenijus. (2010) **Reduction Of Government Capacity In Public Finance Sector** Dalam Sjamsiar, Sjamsuddin **IASIA (International Association of Schools and Institutes of Administration)**. Malang, FIA-UB.
- Dwiputrianti, Septiana. (2010) **Inequality of Resources for Future Perspectives of Indonesia's Fiscal Transparency and Public Accountability** Dalam Sjamsiar, Sjamsuddin **IASIA (International Association of Schools and Institutes of Administration)**. Malang, FIA-UB.
- Mardiasmo (2002a) **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta, Andi.
- Mardiasmo (2002b) **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta, Andi.
- Moe, T.M. (1984) **The new Economic of Organization**. American Journal of Political Science Vol. 28, Nomor 4 (Nov,1984), 739-777
- Muluk, Khairul. (2009) **Peta Konsep Desentralisasi**. Surabaya, itspress.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** (Internet) Available from: <[http://multimediaitjen.dephub.go.id/datakonten/mm/uploadedpdf/PERMENDAGRI\\_21\\_thn\\_2011\\_Perubahan\\_Kedua\\_PERMENDAGRI\\_13\\_tahun\\_2006.pdf](http://multimediaitjen.dephub.go.id/datakonten/mm/uploadedpdf/PERMENDAGRI_21_thn_2011_Perubahan_Kedua_PERMENDAGRI_13_tahun_2006.pdf)> (Accesed: 1 Januari 2013)



- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** (Internet) Available from: <<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=peraturan%20pemerintah%20no%2037%20tahun%202006&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bpkp.go.id%2Fuu%2Fdownload%2F4%2F59%2F844.bpkp&ei=OHK-UbidO4WCrAezxYD4Dw&usg=AFQjCNGlFDv9bgiFZBYksK33lyPEGYUJFw&bvm=bv.47883778,d.bmk>> (Accesed: 1 Januari 2013)
- Rasyid, Ryaas. (2002) **Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa depannya** Dalam Syamsuddin, Haris. Ed.3. **Desentralisasi dan Otonomi Daerah**. Jakarta, LIPI Press.
- Rewansyah, Asmawi. (2010) **Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance**. Jakarta, Yusaintanas Prima.
- Sjamsuddin, Sjamsiar. (2005) **Kepemerintahan dan Kemitraan**. Malang, Yayasan Pembangunan Nasional kerjasama dengan CV. Sofa Mandiri dan Indonesia Print malang.
- Syamsuddin, Haris. (2002) **Desentralisasi dan Otonomi Daerah**. Jakarta, Lipi Press.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara** (Internet) Available from : <<http://www.dikti.go.id/files/atur/pnbp/UU17-2003KeuanganNegara.pdf>> (Accesed: 1 Januari 2013)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah** (Internet) Available from : <[http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU\\_32\\_2004\\_Pemerintahan%20Daerah.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf)> (Accesed: 1 Januari 2013)
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah** (Internet) Available from: <[http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU\\_no\\_33\\_th\\_2004.pdf](http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_no_33_th_2004.pdf)> (Accesed: 1 Januari 2013)
- UNDP. (2009) **Risalah Desentralisasi**, diakses pada Tanggal 21 Januari 2013 dari <http://www.undp.or.id/pubs/docs/risalah%20desentralisasi.pdf>
- Wibowo (2007) **Manajemen Kinerja**. Ed.2 Jakarta, Rajawali Pers.